



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**ANALISIS KEPUTUSAN ETIS PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL DI KOTA BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Danella Dhiastari Putri

2016310036

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**ANALISIS KEPUTUSAN ETIS PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL DI KOTA BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Danella Dhiastari Putri

2016310036

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



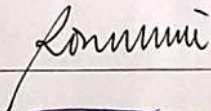
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Danella Dhiastari Putri
NPM : 2016310036
Judul : Analisis Keputusan Etis Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal di Kota Bandung

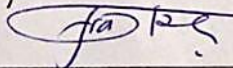
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 26 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

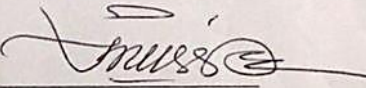
Ketua Sidang merangkap anggota
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris
Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D

: 

Anggota
Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius/Sugeng Prasetyo

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danella Dhiastari Putri
NPM : 2016310036
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Keputusan Etis Pemilihan Penyedia
Barang dan Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal di
Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, dituli sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 09 Januari 2020



Danella Dhiastari Putri

ABSTRAK

Nama : Danella Dhiastari Putri

NPM : 2016310036

Judul : Analisis Keputusan Etis Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal di Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penentuan penyediaan barang dan jasa dalam Katalog Elektronik Lokal Kota Bandung dan menganalisis keputusan etis pemilihan penyedia barang dan jasa dalam Katalog Elektronik Lokal dengan menggunakan strategi tender dan strategi negosiasi. Lima (5) Strategi Tender yaitu 1) Strategi kompetitif, 2) Strategi Menurunkan Harga, 3) Strategi Merugi, 4) Strategi Pembayaran dengan Kelonggaran, 5) Strategi Perundingan Bawah Meja. Sedangkan, Strategi Negosiasi memiliki pertimbangan pada 1) Diri Sendiri dan 2) Masyarakat. Keputusan etis Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal dianalisa menggunakan 6 kompetensi etis yaitu 1) Problem Identification Skills, 2) Problem Solving Skills, 3) Advocacy Skills, 4) Self-Awareness, 5) Subject-matter knowledge, dan 6) Attitude and Commitment.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu Katalog Elektronik Lokal Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 1) Wawancara dengan 22 informan kunci yang terdiri dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia Barang dan Jasa, 2) Kuesioner yang disebarakan kepada Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa dan 3) Studi Dokumen yang dimiliki oleh Unit Layanan Pengadaan. Selain itu penulis juga mengambil informasi melalui media cetak dan elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan barang dan jasa dalam Katalog Elektronik Lokal Kota Bandung menggunakan “tender dengan negosiasi”. Dalam proses tender penyedia barang dan jasa hanya menggunakan strategi pembayaran dengan kelonggaran dan strategi perundingan di bawah meja. Dalam proses negosiasinya, ULP menggunakan strategi *yielding* sedangkan penyedia barang dan jasa menggunakan strategi *Problem Solving*. Keputusan penyedia barang dan jasa dapat disimpulkan memiliki indikasi tidak etis karena hanya memiliki kemampuan *advocacy skill*. Berdasarkan temuan-temuan ini peneliti menyarankan 1) perbaikan sistem katalog elektronik lokal, 2) *survey* pasar oleh ULP. 3) Program Pelatihan mengenai perilaku etis dan membangun pola perilaku etis (etika pengadaan barang dan jasa), dan 4) sosialisasi budaya kerja yang etis dari LKPP dan 5) pembuatan panduan etis sebagai *code of conduct*.

Kata Kunci: Strategi Tender, Strategi Negosiasi, Kompetensi Etis, Elektronik Katalog Lokal

ABSTRACT

Nama : Danella Dhiastari Putri

NPM : 2016310036

Judul : Analysis of Ethical Decisions in Choosing Goods and Services Providers in the Local Electronic Catalogue in Bandung City

This study discusses how to analyze the supply of goods and services in the Bandung Catalogue Electronic Local and analyze the ethical decision of the selection of providers of goods and services in the Local Electronic Catalog by using a auction strategy and negotiation strategy. Five (5) Auctation Strategies, namely 1) Competitive Strategy, 2) Price Reduction Strategy, 3) Loss Strategy, 4) Payment Strategy with Allowance, 5) Under-Table Negotiation Strategy. Meanwhile, Negotiation Strategies have considerations in 1) Self and 2) Society. Ethical decisions on the selection of providers of goods and services in the local electronic catalog are analyzed using 6 ethical competencies, namely 1) problem identification skills, 2) problem solving skills, 3) advocacy skills, 4) self-awareness and consensus building, 5) subject matter knowledge, and 6) attitudes and commitment.

This study uses a qualitative method with the type of case study research that is the Electronic Catalogue Local. Data collection techniques conducted by researchers are 1) Interviews with 22 key informants consisting of Procurement Service Units (ULP), Commitment Making Officers, and Goods and Services Providers, 2) Questionnaires distributed for Procurement Services Officers and Goods and Services Providers and 3) Study of Documents Required by Procurement Services Units. In addition the authors also retrieve information through print and electronic media.

The results of this study show how to provide goods and services in the Bandung Regional Electronic Catalog using "tender by negotiation". In the tender process, providers of goods and services only use a payment strategy with leeway and negotiation strategies under the table. In the negotiation process, ULP uses the generating strategy while the providers of goods and services use the Troubleshooting Strategy. Decisions of providers of goods and services can prove to have an unethical ability because they only have the ability to advocate. Based on these findings the researchers found 1) improvement of the local electronic catalog system, 2) market survey by ULP. 3) Training Program on ethical behavior and the making of ethical behavior patterns (ethical procurement of goods and services), and 4) socialization of ethical work culture from LKPP and 5) making ethical guidelines as a code of ethics.

Keywords: Tender Strategy, Negotiation Strategy, Ethical Competence, Local Electronic Catalog

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Keputusan Penyedia Barang dan Jasa Katalog Elektronik Lokal yang Etis di Kota Bandung**” dengan sebaik – baiknya dan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Skripsi pada jenjang Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, gagasan, dan saran dari berbagai pihak, terutama Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan selaku dosen pembimbing yang selalu sabar, memberikan pengarahan, inspirasi, masukan, dan memotivasi penulis dalam penyusunan proposal rancangan peneltiain. Tanpa Beliau, penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kasih kepada:

1. Keluarga tersayang, Papa, Mama, Adik yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.
2. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
3. Seluruh Dosen, staf, karyawan, dan pekarya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menunjang kegiatan perkuliahan penulis

4. Kak Jamie Wijaya Halim, terimakasih telah menemani dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Asmiar Reza, Raden Annisa Putri K dan Dayva Constantia Viola selaku teman seperbimbingan. terimakasih atas kerjasama yang menyenangkan dan membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.
6. Teman – teman angkatan 2015, 2016, 2017 yang telah mendukung penulis selama perkuliahan.
7. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu yang telah mendoakan dan mendukung penulis

Semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan penulis terima demi menyempurnakan tulisan dalam skripsi ini dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Bandung, Desember 2019

Danella Dhiastari Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
KERANGKA TEORI	14
2.1. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa	14
2.2 Konsep E-Catalogue	17
2.2.1. Pengertian E-Catalogue	17
2.2.2. Jenis – Jenis E-Catalogue	18
2.2.3. Persyaratan Penyedia dalam Katalog Elektronik.....	20
2.2.4. Metode Pemilihan Penyedia dalam Katalog Elektronik Lokal.....	22
2.3 Konsep Tender	29
2.3.1 Pengertian Tender	29
2.3.2 Strategi Tender.....	30
2.4 Konsep Negosiasi	31
2.4.1. Pengertian Negosiasi.....	31
2.4.2. Karakteristik Negosiasi.....	33
2.4.3 Strategi Negosiasi	36
2.4.4. Negosiasi dalam E-Catalogue	40
2.4.5 Tata Cara Negosiasi dalam E-Catalogue	43
2.5. Konsep Etis.....	45
2.5.1 Pengertian Etis	45
2.5.2 Kompetensi Etis.....	46
2.5.3 Kode Etik dalam Pengadaan Barang dan Jasa	50
2.6 Model Penelitian.....	53

BAB III	54
METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Rancangan Penelitian	54
3.2 Tipe Penelitian.....	56
3.3. Sumber Data	57
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	58
3.5 Analisis Data	59
3.6. Pengecekan Keabsahan Temuan	60
3.6 Operasionalisasi Variabel.....	62
3.7 Pedoman Data di Lapangan.....	89
BAB IV	181
TEMUAN PENELITIAN	181
4.1 Penyediaan barang dan jasa dalam Katalog Elektronik Lokal dengan cara Tender.....	181
4.1.1. Strategi Kompetitif	181
4.1.2. Strategi Menurunkan Harga.....	342
4.1.3. Strategi Merugi	351
4.1.3. Strategi Pembayaran dengan Kelonggaran	352
4.1.5. Strategi Perundingan di Bawah Meja	353
4.2 Penyediaan barang dan jasa dalam E-Katalog Lokal dengan cara Negosiasi	354
4.2.1. Diri Sendiri	355
4.2.2 Masyarakat.....	356
4.3 Keputusan Pemilihan Penyedia barang dan jasa dalam E-Katalog Lokal bersifat etis	358
4.3.1. Problem Identification Skills	358
4.3.2. Problem Solving Skills	369
4.3.3 Advocacy Skills	381
4.3.4. Self-Awareness and Consensus Building	383
4.3.5. Subject Matter Knowledge	383
4.3.6. Attitude and Commitment	389
BAB V.....	392
PEMBAHASAN	392

5.1 Penyediaan barang dan jasa dalam Katalog Elektronik Lokal dengan cara Tender.....	392
5.2 Penyediaan barang dan jasa dalam Katalog Elektronik Lokal dengan cara Negosiasi	396
5.3 Keputusan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dalam E-Katalog Lokal Bersifat Etis	399
5.1.1 <i>Problem Identification Skills</i>	400
5.1.2 <i>Problem Solving Skills</i>	401
5.1.3 <i>Advocacy Skills</i>	408
5.1.4 <i>Self-Awareness and Concensus Building</i>	409
5.1.5 <i>Subject Matter Knowledge</i>	410
5.1.6 <i>Attitude and Commitment</i>	411
KESIMPULAN DAN SARAN.....	414
6.1 Kesimpulan.....	414
6.2 Saran.....	415
DAFTAR PUSTAKA	417

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	62
Tabel 3.2 Pedoman Pengambilan Data di Lapangan.....	89
Tabel 4.1 Penyedia Barang Aspal di Katalog Elektronik Lokal.....	182
Tabel 4.2 Penyedia Jasa Cleaning Service – General Building and Office Cleaning and Maintenance Service di Katalog Elektronik Lokal	183
Tabel 4.3 Penyedia Jasa Tenaga Pengamanan – Security Guard Services di Katalog Elektronik Lokal.....	185
Tabel 4.4 Penyedia Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi – Permanent Drivers di Katalog Elektronik Lokal	186
Tabel 4.5 Harga pengadaan Aspal di Katalog Lokal	343
Tabel 4.6 Harga pengadaan Jasa Cleaning Service di Katalog Lokal	343
Tabel 4.7 Harga Pengadaan Jasa Keamanan di Katalog Lokal	345
Tabel 4.8 Harga pengadaan Jasa Tenaga Supir di Katalog Lokal	346
Tabel 4.9 Harga pengadaan Jasa Tenaga Supir di Katalog Lokal.....	348
Tabel 4.10 Harga pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan di Marketplace lain.....	349
Tabel 4.11 Harga pengadaan Jasa Tenaga Cleaning Service di Marketplace lain	350
Tabel 4.12 Harga pengadaan Jasa Tenaga Pengemudi di Marketplace lain.....	350
Tabel 4.13 Perbandingan Harga Barang	351
Tabel 4.14 Dasar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mencantumkan Harga di Katalog Lokal untuk Diri Sendiri	355
Tabel 4.15 Dasar Penyedia Barang dan Jasa Mencantumkan Harga di Katalog Lokal untuk Diri Sendiri	356
Tabel 4.16 Dasar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mencantumkan Harga di Katalog Lokal untuk Diri Sendiri	356
Tabel 4.17 Dasar Penyedia Barang dan Jasa Mencantumkan Harga di Katalog Lokal untuk Masyarakat.....	357
Tabel 4.18 Masalah dan Penyebab Permasalahan mengenai Katalog Lokal.....	364
Tabel 4.19 Solusi atas Penyelewengan yang terjadi di Katalog Elektronik Lokal	369

Tabel 4.20 Dasar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mencantumkan Harga di Katalog Lokal untuk Diri Sendiri	382
Tabel 4.21 Dasar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mencantumkan Harga di Katalog Lokal untuk Diri Sendiri	382
Tabel 4.22 Solusi atas Penyelewengan yang terjadi di Katalog Elektronik Lokal	390

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	188
Daftar Harga dan Penyedia Aspal Drum oleh PT 1	189
Gambar 4.2	189
Informasi Utama Aspal Drum oleh PT 1	189
Gambar 4.3	190
Garansi oleh PT 1	190
Gambar 4.4	191
Riwayat Harga oleh PT 1	191
Gambar 4.5	192
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 2	192
Gambar 4.6	192
Informasi Utama Jasa Cleaning Service oleh PT 2	192
Gambar 4.7	193
Riwayat Harga oleh PT 2	193
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 2	194
Gambar 4.9	194
Informasi Utama Jasa Cleaning Service oleh PT 2	194
Gambar 4.10	195
Riwayat Harga oleh PT 2	195
Gambar 4.11	196
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 2	196
Gambar 4.12	196
Informasi Utama Jasa Cleaning Service oleh PT 2	196
Gambar 4.13	197
Riwayat Harga oleh PT 2	197
Gambar 4.14	198
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 3	198
Gambar 4.15	198
Informasi Utama Jasa Cleaning Service oleh PT 3	198
Gambar 4.16	199
Riwayat Harga oleh PT 3	199

Gambar 4.17	200
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 3	200
Gambar 4.18	200
Informasi Utama Jasa Cleaning Service oleh PT 3	200
Gambar 4.19	201
Riwayat Harga oleh PT 3	201
Gambar 4.20	202
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 3	202
Gambar 4.21	202
Informasi Utama Jasa Cleaning Service oleh PT 3	202
Gambar 4.22	203
Riwayat Harga oleh PT 3	203
Gambar 4.23	204
Daftar Harga dan Penyedia Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4 ..	204
Gambar 4.24	204
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 4.....	204
Gambar 4.25	205
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	205
Gambar 4.26	206
Daftar Harga dan Penyedia Pengawas Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	206
Gambar 4.27	206
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	206
Gambar 4.28	207
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	207
Gambar 4.29	208
Daftar Harga dan Penyedia Anggota Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	208
Gambar 4.30	208
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	208
Gambar 4.31	209
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 4.....	209
Gambar 4.32	210
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 5	210
Gambar 4.33	210

Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 5	210
.....	210
Gambar 4.34.....	211
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 5.....	211
Gambar 4.35.....	212
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga <i>cleaning service</i> oleh PT 5 ..	212
Gambar 4.36.....	212
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga <i>cleaning service</i> oleh PT 5 ..	212
Gambar 4.37.....	213
Riwayat Harga Pengawas Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 5	213
Gambar 4.38.....	214
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga <i>cleaning service</i> oleh PT 5....	214
Gambar 4.40.....	215
Riwayat Harga Anggota Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 5	215
Gambar 4.41	216
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga <i>cleaning service</i> oleh PT 6 ..	216
.....	216
Gambar 4.42.....	217
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 6	217
Gambar 4.43.....	217
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 6.....	217
Gambar 4.44.....	218
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga <i>cleaning service</i> oleh PT 6 ..	218
Gambar 4.1.45.....	219
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 6	219
Gambar 4.46.....	220
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 6.....	220
Gambar 4.47.....	220
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga <i>cleaning service</i> oleh PT 6....	220
Gambar 4.48.....	221
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 6	221
Gambar 4.49.....	222
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 6.....	222
Gambar 4.50.....	222

Daftar Harga Jasa Anggota <i>Cleaning Service</i> oleh PT 7	222
Gambar 4.51	223
Informasi Utama Jasa Anggota <i>Cleaning Service</i> oleh PT 7	223
Gambar 4.52	224
Riwayat Harga Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 7	224
Gambar 4.53	225
Daftar Harga Jasa Pengemudi SIM B1 oleh PT 8.....	225
Gambar 4.54	225
Informasi Utama Jasa Pengemudi SIM B1 oleh PT 8.....	225
Gambar 4.55	226
Riwayat Harga Jasa Pengemudi SIM B1 oleh PT 8.....	226
Gambar 4.56	227
Daftar Harga Jasa Pengemudi SIM A oleh PT 8	227
Gambar 4.57	227
Informasi Utama Jasa Pengemudi SIM A oleh PT 8	227
Gambar 4.58	228
Riwayat Harga Jasa Pengemudi SIM B1 oleh PT 8.....	228
Gambar 4.59	229
Daftar Harga Jasa Tenaga Anggota <i>Cleaning Service</i> oleh PT 8.....	229
Gambar 4.60	229
Informasi Utama Jasa Tenaga Anggota <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	229
Gambar 4.61	230
Riwayat Harga Jasa Tenaga Anggota <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8.....	230
Gambar 4.62	231
Daftar Harga Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh PT 8	231
Gambar 4.63	231
Informasi Utama Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	231
Gambar 4.64	232
Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	232
Gambar 4.65	233
Daftar Harga Jasa Tenaga Koordinator <i>Cleaning Service</i> oleh PT 8.....	233
Gambar 4.66	234
Informasi Utama Jasa Tenaga Koordinator <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8.....	234
Gambar 4.67	235

Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	235
Gambar 4.68.....	236
Daftar Harga Jasa Tenaga Koordinator <i>Cleaning Service</i> oleh PT 8.....	236
Gambar 4.69.....	236
Informasi Utama Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	236
Gambar 4.70.....	237
Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	237
Gambar 4.71	238
Daftar Harga Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 8.....	238
Gambar 4.72.....	238
Informasi Utama Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	238
Gambar 4.73.....	239
Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengawas <i>Cleaning Service</i> oleh oleh PT 8	239
Gambar 4.74.....	240
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 9	240
Gambar 4.75.....	241
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 9	241
Gambar 4.76.....	242
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 9.....	242
Gambar 4.77.....	242
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga cleaning service oleh PT 9	242
Gambar 4.79.....	243
Riwayat Harga Pengawas Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 9	243
Gambar 4.80.....	244
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 9	244
Gambar 4.81	245
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 9	245
Gambar 4.82.....	245
Riwayat Harga Pengawas Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 9	245
Gambar 4.83.....	246
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengemudi B1 oleh PT 10.....	246
Gambar 4.84.....	247
Informasi Utama Jasa Pengemudi B1 oleh PT 10.....	247

.....	247
Gambar 4.85	247
Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengemudi B1 oleh PT 10.....	247
Gambar 4.86.....	248
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengemudi B1 oleh PT 10.....	248
Gambar 4.87.....	248
Informasi Utama Jasa Pengemudi A oleh PT 10	248
Gambar 4.88.....	249
Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengemudi A oleh PT 10.....	249
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service PT 10....	250
Gambar 4.90.....	250
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10	250
Gambar 4.91	251
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10.....	251
Gambar 4.92.....	252
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga cleaning service PT 10	252
Gambar 4.93.....	252
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10	252
Gambar 4.94.....	253
Riwayat Harga Pengawas Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10	253
Gambar 4.95.....	254
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga cleaning service PT 10.....	254
Gambar 4.96.....	254
Informasi Utama Anggota Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10.....	254
Gambar 4.97.....	255
Riwayat Harga Anggota Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10	255
Gambar 4.98.....	256
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan PT 10	256
Gambar 4.99.....	256
Informasi Utama Jasa Koordinator Tenaga Pengamana oleh PT 10.....	256
Gambar 4.100.....	257
Riwayat Harga Anggota Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10	257
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan PT 10.....	258
Gambar 4.102.....	258

Informasi Utama Jasa Koordinator Tenaga Pengamana oleh PT 10.....	258
Gambar 4.103.....	259
Riwayat Harga Anggota Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 10	259
Gambar 4.104.....	260
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 11	260
Gambar 4.105.....	260
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 11	260
Gambar 4.106.....	261
riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 11	261
Gambar 4.107.....	262
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga cleaning service oleh PT 11	262
Gambar 4.108.....	262
Informasi Utama Pengawas Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 11.....	262
Gambar 4.109.....	263
Riwayat Harga Pengawas Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 11	263
Gambar 4.110.....	264
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 11	264
Gambar 4.111	264
Informasi Utama Koordinator Jasa <i>Cleaning Service</i> oleh PT 11	264
Gambar 4.112.....	265
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 11.....	265
Gambar 4.113.....	266
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 11	266
Gambar 4.114.....	266
Informasi Utama Koordinator Jasa Pengamanan oleh PT 11	266
Gambar 4.115.....	267
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 11.....	267
Gambar 4.116.....	268
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga cleaning service oleh PT 11..	268
Gambar 4.117.....	268
Informasi Utama Anggota Jasa Pengamanan oleh PT 11	268
Gambar 4.118.....	269

Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 11.....	269
Gambar 4.119.....	270
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga cleaning service oleh PT 12	270
Informasi Utama Koordinator Jasa Cleaning Service oleh PT 12	270
Gambar 4.121	271
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 12.....	271
Gambar 4.122.....	272
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga Cleaning Service oleh PT 12	272
Gambar 4.123.....	272
Informasi Utama Pengawas Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 12	272
Gambar 4.124.....	273
Riwayat Harga Pengawas Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 12.....	273
Gambar 4.125.....	274
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Cleaning Service oleh PT 12	274
Gambar 4.126.....	274
Informasi Utama Anggota Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 12	274
Gambar 4.127.....	275
Riwayat Harga Pengawas Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 12.....	275
Gambar 4.128.....	276
Daftar Harga dan Penyedia Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 12	276
Gambar 4.129.....	276
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 12.....	276
Gambar 4.130.....	277
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 12.....	277
Gambar 4.131	278
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 12	278
Gambar 4.132.....	278
Informasi Utama Anggota Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 12	278
Gambar 4.132.....	279
Riwayat Harga Pengawas Tenaga Pengamanan oleh PT 12.....	279
Gambar 4.133.....	280
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tengaa Pengemudi SIM B1 oleh PT 12.....	280
Gambar 4.134.....	280

Informasi Utama Jasa Tengaa Pengemudi SIM B1 oleh PT 12.....	280
Gambar 4.135.....	281
Riwayat Harga Jasa Tengaa Pengemudi SIM B1 oleh PT 12.....	281
Gambar 4.136.....	282
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tengaa Pengemudi SIM A oleh PT 12	282
Gambar 4.137.....	282
Informasi Utama Jasa Tengaa Pengemudi SIM A oleh PT 12.....	282
Gambar 4.138.....	283
Riwayat Harga Jasa Tengaa Pengemudi SIM A oleh PT 12.....	283
Gambar 4.138.....	284
Daftar Harga dan Penyedia Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 13	284
Gambar 4.139.....	284
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 13.....	284
Gambar 4.141	286
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Pengawas Tenaga Pengamanan oleh PT 13	286
Gambar 4.142.....	286
Informasi Utama Pengawas Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 13	286
Gambar 4.143.....	287
Riwayat Harga Pengawas Tenaga Pengamanan oleh PT 13.....	287
Gambar 4.144.....	288
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 13	288
Gambar 4.146.....	289
Riwayat Harga Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 13	289
Gambar 4.147.....	290
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengemudi SIM B1 oleh PT 14.....	290
Gambar 4.148.....	290
Informasi Utama Jasa Tenaga Pengemudi B1 oleh PT 14.....	290
Gambar 4.150.....	292
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengemudi SIM A oleh PT 14	292
Gambar 4.151	292
Informasi Utama Jasa Tenaga Pengemudi A oleh PT 14.....	292
Gambar 4.152.....	293
Riwayat Harga Jasa Tenaga Pengemudi A oleh PT 14.....	293
Gambar 4.153.....	294

Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 14.....	294
Gambar 4.154.....	294
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 14.....	294
Gambar 4.155.....	295
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 14.....	295
Gambar 4.156.....	296
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 14.....	296
Gambar 4.157.....	296
Informasi Utama Anggota Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 14.....	296
Gambar 4.158.....	297
Riwayat Harga Anggota Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 14.....	297
Gambar 4.159.....	298
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Cleaning Service oleh PT 14.....	298
Gambar 4.160.....	298
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Cleaning Service oleh PT 14.....	298
.....	298
Gambar 4.161.....	299
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 14.....	299
Gambar 4.162.....	300
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 14.....	300
Gambar 4.163.....	300
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga <i>Cleaning Service</i> oleh PT 14.....	300
Gambar 4.164.....	301
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 14.....	301
Gambar 4.166.....	302
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 14.....	302
Gambar 4.167.....	303
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 14.....	303
Gambar 4.168.....	304
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 15.....	304
Gambar 4.169.....	305
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 15.....	305
Gambar 4.170.....	306
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 15.....	306

Gambar 4.171	306
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 15	306
Gambar 4.173	308
Riwayat Harga Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 15	308
Gambar 4.174	309
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 16	309
Gambar 4.175	309
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 16	309
Gambar 4.176	310
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 16	310
Gambar 4.177	311
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 16	311
Gambar 4.178	311
Informasi Utama Anggota Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 16	311
Gambar 4.179	312
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 16	312
Gambar 4.180	313
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 17	313
Gambar 4.181	313
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 17	313
Gambar 4.182	314
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 17	314
Gambar 4.183	315
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 17	315
Gambar 4.184	315
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 17	315
Gambar 4.185	316
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 17	316
Gambar 4.186	317
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 18	317
Gambar 4.187	317
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 18	318
Gambar 4.188	318
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 18	318

Gambar 4.189	319
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 18 .	319
Gambar 4.190	319
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 18.....	319
Gambar 4.191	320
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 18.....	320
Gambar 4.192	321
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 19 .	321
Gambar 4.193	321
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 19.....	321
Gambar 4.194	322
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 19.....	322
Gambar 4.195	323
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 19 .	323
Gambar 4.196	323
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 19.....	323
Gambar 4.197	324
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 19.....	324
Gambar 4.198	325
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 20 .	325
Gambar 4.199	325
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 20.....	325
Gambar 4.200	326
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 20.....	326
Gambar 4.201	327
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 20	327
Gambar 4.203	328
Riwayat Harga Anggota Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 20	328
Gambar 4.204	329
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 21 .	329
Gambar 4.205	329
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 21.....	329
Gambar 4.206	330
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 21.....	330

Gambar 4.207	331
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 21	331
Gambar 4.208	331
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 21	331
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 21	332
Gambar 4.210	333
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 22	333
Gambar 4.211	333
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 22	333
Gambar 4.212	334
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 22	334
Gambar 4.213	334
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Anggota Tenaga Pengamanan oleh PT 22	334
Gambar 4.214	335
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 22	335
Gambar 4.215	336
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 22	336
Gambar 4.216	336
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 23	336
Gambar 4.217	337
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 23	337
Gambar 4.218	338
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 23	338
Gambar 4.219	339
Daftar Harga dan Penyedia Jasa Koordinator Tenaga Pengamanan oleh PT 23	339
Gambar 4.220	339
Informasi Utama Koordinator Jasa Tenaga Pengamana oleh PT 23	339
Gambar 4.221	340
Riwayat Harga Koordinator Jasa Tenaga Pengamanan oleh PT 23	340
Gambar 4.222	341
Pengetahuan Adanya Kecurangan oleh Penyedia Barang dan Jasa saat Mencantumkan Barang dan Jasanya di Katalog Elektronik Lokal	341
Gambar 4.223	352
Pembayaran Pembelian Barang dan Jasa kepada Penyedia Barang dan Jasa	352

Gambar 4.224	353
Berdiskusi secara Informal Ketika Menentukan Harga di Katalog Elektronik Lokal	353
Gambar 4.225	354
Berdiskusi secara Informal Ketika Menentukan Harga di Katalog Elektronik Lokal	354
Gambar 4.226	360
Pengetahuan ULP terhadap Permasalahan Masih Adanya Biaya Lain di Luar yang tertera di dalam Katalog Elektronik	360
Gambar 4.227	361
Pengetahuan ULP terhadap Permasalahan Data dan Informasi Produk yang dicantumkan dalam Aplikasi Elektronik Belum Ada Peringatan Secara Otomatis	361
Gambar 4.228	362
Pengetahuan ULP terhadap Permasalahan Data dan Informasi Produk yang dicantumkan dalam Aplikasi Elektronik Belum Ada Peringatan Secara Otomatis	362
Gambar 4.229	363
Pengetahuan ULP terhadap Permasalahan Data dan Informasi Produk yang dicantumkan dalam Aplikasi Elektronik Belum Ada Peringatan Secara Otomatis	363
Gambar 4.230	366
Spesifikasi Harga	366
Gambar 4.231	366
Informasi Utama.....	366
Gambar 4.232	367
Riwayat Harga.....	367
Gambar 4.233	368
Tindakan yang dilakukan ULP ketika Mengetahui Adanya Penyelewengan	368
Gambar 4.234	372
Tindakan ULP Jika Terjadi Permasalahan Penyediaan Barang yang Tidak Lengkap	372
Gambar 4.235	373
Tindakan ULP terhadap Pemberian Informasi yang Bersifat Rahasia.....	373
Gambar 4.236	374
Tindakan ULP saat Mengetahui Adanya Kesepakatan/Kontrak yang Dilanggar oleh Penyedia Barang dan Jasa	374

Gambar 4.237	375
Tindakan ULP ketika Kerabat diminta Membantu dan Memudahkan Proses Pencantuman Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.....	375
Gambar 4.238.....	376
Tindakan ULP ketika Melihat Teman yang sedang Melakukan Kecurangan.....	376
Gambar 4.239.....	377
Tindakan ULP Ketika Pada Saat Menentukan Penyedia Melihat Penyedia tersebut Sudah Berkali – kali Menjalankan Proses Pengadaan dengan Sangat Baik	377
Gambar 4.240.....	378
Tindakan ULP saat Diberikan Hadiah oleh Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah	378
Gambar 4.241	379
Tindakan Penyedia Barang dan Jasa Ketika Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Awal	379
Gambar 4.242.....	380
Tindakan Penyedia Barang dan Jasa Ketika Mencoba Terpilih dalam Tender ...	380
Gambar 4.243.....	381
Tindakan Penyedia Barang dan Jasa ketika Pencantuman Barang dan Jasanya ditolak oleh ULP	381
Gambar 4.244.....	384
Pengetahuan ULP terhadap Etika Pengadaan Barang dan Jasa	384
Gambar 4.245.....	385
Etika Pengadaan Barang dan Jasa di ULP	385
Gambar 4.246.....	386
Pengetahuan Budaya Perilaku Etis ULP	386
Gambar 4.247.....	387
Budaya Kerja di LKPP.....	387
Gambar 4.248.....	388
Pengetahuan Penyedia Barang dan Jasa terhadap Budaya Kerja LKPP	388
Gambar 4.249.....	389
Pengetahuan Penyedia Barang dan Jasa terhadap Budaya Kerja LKPP	389
Gambar 5.3.....	412
Keputusan Etis Penyedia Barang dan Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal Kota Bandung	412

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Hal ini menuntut setiap negara untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada di negara lain. Salah satu bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ialah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang administrasi publik, yaitu dengan adanya *E-Government*. Sebagaimana yang dikutip dalam artikel jurnal “*Does ICT Matters for Corruption*” oleh Sinuraya & Rachmawati (2016) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information, Communication, and Technology (ICT)* memiliki kesamaan dengan E-Government, namun (yang dikutip dari Sinuraya & Rachmawati, 2016:50), *ICT* didefinisikan sebagai:

*“ICT-information, communication and technology-is an umbrella term that includes any communication device or application, encompassing; radio, television, cellular phones, computer and network hardware and software, satellite systems and so on as well as the various services and application associated with them”*¹

Rouse Margareth menjelaskan bahwa informasi, komunikasi dan teknologi adalah istilah umum yang mencakup segala perangkat atau aplikasi komunikasi, yang meliputi: radio, televisi, telepon seluler, perangkat keras dan luna

¹ C.G. Sinuraya, dan T.Rachmawati, ‘Does ICT Matters For Corruption’, 1 (2016):50.

jaringan dan komputer, sistem satelit dan sebagainya serta berbagai layanan dan aplikasi yang terkait dengannya². Sedangkan *E-Government* sebagaimana yang dipaparkan oleh Richard Heeks (2003) dalam jurnal “*Most e-Government for Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced*” dijelaskan bahwa *E-Government* adalah penggunaan *ICTs* untuk meningkatkan kegiatan organisasi di sektor publik. (Heeks 2003)³

Berdasarkan buku “*The E-Government Handbook for Developing Countries*” (yang dikutip dari Sinuraya & Rachmawati, 2016:50) *E-Government* didefinisikan sebagai: “*E-Government is the use of information and communication technologies to transform government by making it more accessible, effective and accountable.*”

⁴. Yang artinya, E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasikan pemerintah dengan membuatnya lebih mudah diakses, efektif, dan akuntabel. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas mendukung diimplementasikannya E-Government sebagai salah satu bentuk pemanfaatan *ICTs* di sektor administrasi publik. Selain itu, dalam Buku “*Public Sector Using Information Technologies Transforming Policy into Practice*” disampaikan bahwa E-Government adalah Infrastruktur dan layanan ICT untuk dukungan yang nyaman dan aman antara pemerintah dan warga negara (G2C), pemerintah dan bisnis (G2B),

² Ibid,50.

³ R. Heeks, ‘Most eGovernment for Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced’, 14 (2003):2.

⁴ C.G. Sinuraya, dan T.Rachmawati, Op.cit, 2016, 50.

dan antara lembaga pemerintah (G2G). (Christos Manolopoulos, Christos Manolopoulos, Paul Spirakis, Yiannis C. Stamatiou. 2011)⁵

Di Indonesia, kebijakan mengenai E-Government tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Salah satu bentuk pengembangan E-Government adalah dengan adanya penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.⁶

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁷ Dengan adanya pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik serta dapat meningkatkan perkembangan ekonomi nasional dan daerah. Oleh karena itu, pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.⁸ Pengadaan barang atau jasa juga dituntut dilakukan secara

⁵,C. Manolopoulos, D. Sofotassios, P. Spirakis, dan Y.C. Stamatiou, 'ICT and eGovernance:The Citizen's Trust Facet' dalam *Public Sector Using Information Technologies Transforming Policy into Practice*, T. Papodopoulos, dan P. Kanellis, 136 (United States: IGI GLOBAL, 2012).

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

⁷ Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ Loc.cit

efisien dan efektif supaya dapat sebagai sarana dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Namun, berdasarkan hasil pantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* (2018) selama tahun 2017, dari total 576 kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, ternyata 42% atau 241 kasus korupsi terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Jumlah tersebut menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 195 kasus korupsi (ICW 2018)⁹ Selain itu, hampir 80% kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. (The Indonesian Institute 2017)¹⁰ Berdasarkan hasil pantauan KPK, Sebanyak 142 perkara korupsi dari 468 perkara merupakan korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Perkara penyuapan yang ditangani oleh KPK juga terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa. Jumlah Pengaduan masyarakat terkait Pengadaan Barang dan Jasa ke KPK sampai tahun 2015 sekitar 12.693 pengaduan. Kerugian keuangan negara dari kasus Pengadaan Barang dan Jasa yang ditangani KPK, hampir 1 triliun. (Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2014).¹¹

Mengingat pentingnya perbaikan dalam sektor pengadaan barang dan jasa, pemerintah Indonesia merevisi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

⁹ ICW, "Transparansi Pengadaan Pemerintah", <https://antikorupsi.org/id/news/transparansi-pengadaan-pemerintah>, diakses pada 8 Februari 2019 Pukul 20.25

¹⁰ The Indonesian Institute, "*Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*", <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/> diakses pada 8 Februari 2019 Pukul 21.00

¹¹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 69, penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Sistem Pengadaan Secara Elektronik merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di instansi seluruh K/L/PD.¹² Sehingga, Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi landasan utama penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan tetap memperhatikan rambu – rambu dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³ Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagai salah satu perwujudan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam menangani kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik merupakan proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi

¹² LKPP, "Layanan Pengadaan Secara Elektronik, <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publik/tentangkami> diakses pada 15 April 2019 Pukul 12.04

¹³ Sustain, "Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, <http://sustain.id/2018/08/27/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik/>

informasi dan komunikasi atau ICT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dapat meningkatkan dan menjamin adanya nilai-nilai publik seperti efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam melakukan pembelanjaan uang negara. Selain itu, diharapkan dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat serta mewujudkan keadilan (*nondiscriminative*) bagi seluruh pelaku yang berkaitan langsung dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah. (LKPP, Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Katalog Produk Barang dan Jasa Pemerintah 2016)¹⁴

Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik secara nasional dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Tidak hanya ditingkat nasional, Pengadaan barang dan Jasa secara elektronik juga dikembangkan di setiap daerah oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terdapat di masing – masing daerah. Indonesia memiliki 518 LPSE serta ULP yang tersebar di 33 Provinsi, 91 Kota dan 394 Kabupaten. Angka ini membuktikan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia telah memiliki layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE maupun ULP. 518 LPSE dan ULP yang ada di setiap daerah di Indonesia menyediakan salah satu bentuk layanan atau fasilitas

¹⁴ LKPP, “Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Katalog Produk Barang dan Jasa Pemerintah”, <https://e-katalog.lkpp.go.id/files/upload/konten/Panduan/USER%20GUIDE%20e-Catalogue%20Penyedia.pdf> diakses pada 8 Februari 2019 Pukul 21.30

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yaitu *E-Purchasing* dengan menggunakan *E-Catalogue*.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa pembelian secara elektronik yang disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog Elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait dengan barang atau jasa.¹⁵ Katalog Elektronik Daerah merupakan salah satu bentuk katalog elektronik.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog, Dwi Satrianto, pemilihan penyedia e-katalog terdiri dari 2 jenis yaitu melalui lelang dan non lelang atau disebut juga sebagai negosiasi. Menurutnya, mekanisme lelang akan digunakan dalam pemilihan penyedia e-katalog ketika spesifikasi teknis suatu produk dapat distandarkan dan ada banyak penyedia yang berkompetisi. Sedangkan pemilihan penyedia e-katalog dengan bernegosiasi dilakukan ketika hanya terdapat penyedia tunggal.¹⁶ Hal ini pun diperkuat oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing, dijelaskan usulan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Daerah dilakukan oleh

¹⁵ Peraturan Presiden no 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁶Pengadaan, "Dengan E-Katalog Pemerintah Tidak Harus memilih Produk dengan Harga Terendah" <https://www.pengadaan.web.id/2016/10/dengan-e-katalog-pemerintah-tidak-harus-memilih-produk-dengan-harga-terendah.html> diakses pada 8 Februari 2019 pukul 22.00

pimpinan SKPD pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Katalog Daerah. Pemilihan penyedia pada Katalog Elektronik Lokal dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode:

- a. Lelang/seleksi atau
- b. Non lelang/non seleksi

Metode pemilihan penyedia ini dapat dilakukan dengan cara negosiasi maupun tanpa negosiasi.¹⁷

Katalog Elektronik dianggap menjadi solusi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya Pejabat Pembuat Komitmen di daerah yang melakukan pembelian barang dan jasa di Katalog Elektronik. Mereka lebih memilih menggunakan Katalog Elektronik karena dinilai prosesnya lebih transparan dan harga yang ditampilkan sesuai.¹⁸ Penerapan Katalog Elektronik juga meminimalkan celah penggelembungan harga. Sehingga barang dan jasa yang dicantumkan di Katalog Elektronik merupakan harga yang paling akuntabel karena sudah melalui proses pemilihan baik melalui LKPP maupun melalui Unit Layanan Pengadaan di masing – masing daerah. Dengan kata lain, dengan adanya Katalog Elektronik dapat mengurangi modus korupsi penggelembungan harga. Modus Korupsi Penggelembungan harga merupakan modus korupsi terbanyak dalam pengadaan barang dan jasa.

¹⁷ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing

¹⁸ Media Indonesia, "E-Katalog Diklaim Tekan Korupsi"

Selain itu, adanya pengembangan Katalog elektronik juga memungkinkan sebuah organisasi untuk memasarkan penawaran produk mereka secara elektronik, sehingga Katalog Elektronik menjadi alat pemasaran yang baik untuk penyedia barang/jasa dan pengguna Katalog Elektronik. Selain itu, adanya **transparansi harga di Katalog Elektronik** karena pengguna *e-catalogue* dapat dengan mudah melihat beberapa harga barang.¹⁹ Tidak hanya itu, proses pengadaan barang dan jasa menggunakan Katalog Elektronik dinilai menjadi efisien dan dapat memangkas waktu pengadaan yang awalnya lama menjadi lebih singkat. Spesifikasi teknik dan harganya pun sudah dicantumkan secara seragam.²⁰ Hal ini membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki banyak manfaat. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat e-Catalogue terdiri dari:

1. Data dapat diperbarui dan diakses dengan mudah dan cepat.
2. Struktur di dalam E-Catalogue dapat membantu pengguna untuk mengelompokkan barang menjadi lebih mudah diakses.
3. Adanya peluang menerima pemesanan barang secara online dapat mengakibatkan penghematan biaya.
4. Meningkatkan keakuratan pemesanan barang karena terdapat transparansi spesifikasi detail produk dan harga barang.

¹⁹ Oxford College of Procurement & Supply, "The Benefits of E-Procurement"
<https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/the-benefits-of-e-procurement/>
diakses pada 11 Agustus 2019 pukul 21.00

²⁰ Farset, "Mengenal Sistem E-catalogue dan E-Purchasing dalam Proses Pengadaan Sediaan Farmasi" <https://gudangilmu.farmasetika.com/mengenal-sistem-e-catalogue-dan-e-purchasing-dalam-proses-pengadaan-sediaan-farmasi/> diakses pada tanggal 8 Maret

5. Data lebih akurat sehingga mengurangi tingkat kesalahan ketidaksesuaian faktur dengan pesanan pengguna.

Namun, penerapan Katalog Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menyebabkan beberapa penyelewengan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal.²¹ Pertama, mekanisme penentuan penyedia dalam Katalog Elektronik melalui dua cara yaitu lelang dan negosiasi masih menyisakan ruang untuk melakukan penyelewengan, terutama ketika melakukan negosiasi penentuan harga dengan penyedia.

Kedua, aplikasi Katalog Elektronik belum secara transparan menampilkan dokumen – dokumen yang diperlukan oleh Pengguna Katalog Elektronik (Lestyowati 2018).²² Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai analisis permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat permasalahan masih adanya biaya lain diluar harga yang tertera di dalam Katalog Elektronik. Ketika melakukan pemesanan, pengguna Katalog Lokal dapat diminta untuk membayar biaya – biaya lain di luar kontrak. Selain itu, data dan informasi produk yang dicantumkan dalam aplikasi Katalog Elektronik belum ada peringatan secara otomatis untuk produk yang kontraknya akan atau telah

²¹ Bara Ilyasa, "Ini Kekurangan Sistem Katalog Elektronik Hasil Temuan BPK", <http://www.teropongsenayan.com/38852-ini-kekurangan-sistem-katalog-elektronik-hasil-temuan-bpk> diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 22.23

²² Jamila Lestyowati, "Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja", <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/224/170> diakses pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.14

berakhir. Riwayat transaksi pembelian juga belum dicantumkan dalam Katalog Elektronik.²³

Ketiga, harga yang dicantumkan di Katalog Elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan *marketplace* yang lain²⁴. Hal ini menjadi permasalahan karena Harga di Katalog Elektronik seharusnya merupakan harga termurah.

Dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEPUTUSAN ETIS PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI KOTA BANDUNG”**

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penentuan penyediaan barang dan jasa dalam E-Catalogue Lokal Kota Bandung?
2. Strategi Negosiasi apa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa?
3. Apakah keputusan pemilihan penyedia barang dan jasa dalam E-Catalogue Lokal bersifat etis?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

1. Menganalisis cara penentuan penyediaan barang dan jasa dalam E-Catalogue Lokal Kota Bandung
2. Mengidentifikasi strategi negosiasi yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa
3. Menganalisis keputusan etis pemilihan penyedia barang dan jasa dalam E-Catalogue Lokal

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bukti – bukti empiris mengenai konsep – konsep yang dipelajari dalam bidang ilmu administrasi publik khususnya dalam mata kuliah Etika Administrasi Publik dan Konflik Organisasional dan Negosiasi. Selain itu dapat menjadi referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Etika Administrasi Publik dan Konflik Organisasional dan Negosiasi.

b. Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini berguna untuk:

- 1 Mengetahui cara penyediaan barang dan jasa oleh Unit Layanan Pengadaan dan penyedia barang dan jasa. Sehingga dapat melihat bagaimana proses tender dan negosiasi dilakukan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah keputusan etis pemilihan penyedia untuk Katalog Elektronik Lokal. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat melihat perilaku etis Unit Layanan Pengadaan dan

penyedia barang dan jasa dalam mencantumkan barang dan jasanya di Katalog Elektronik Lokal.

- 2 Hasil penelitian ini dapat memberikan umpan balik kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintahan) selaku pengembang dan perumus kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melakukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dalam melakukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam penggunaan Katalog Elektronik.
- 3 Dapat memberikan umpan balik juga kepada Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Penyedia Barang dan Jasa yang merupakan aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah